



REPRESENTASI ARGUMENTASI DALAM OPINI PARADIGMA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Nur Inayah¹, Zalwa Magfirah.M², Tresna Niswati³, Ashar Reskiawan⁴, Abdul Wahid⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Makassar
Corresponding author: nurinayah23p@gmail.com

Info Artikel

Submit: 17

Juli 2024

Accepted:

27 Juli 2024

Publish: 31 Juli
2024

Keywords:
Pemindahan Ibu
Kota, Urbanisasi,
Infrastruktur

© 2024
Education and
Talent
Development
Center of
Indonesia (ETDC
Indonesia)
Under the license
CC BY-SA 4.0



Abstrak

Pemindahan ibu kota negara telah banyak dibicarakan berbagai pihak sejak beberapa tahun lalu. Tujuan pemindahan ibu kota tersebut karena pesatnya urbanisasi di Jabodetabek ini ternyata tidak dapat diimbangi oleh tersedianya fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai, sehingga berbagai masalah seperti, banjir, kemacetan lalu lintas dan permukiman kumuh menjadi semakin sulit diatasi. Jenis metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dan sumber data melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta dipertimbangkan karena masalah banjir dan kemacetan lalu lintas yang parah serta urbanisasi yang tidak diimbangi dengan infrastruktur memadai. Sejak banjir besar tahun 2007 dan diskusi oleh Presiden SBY pada 2009, beban pelayanan Jakarta sebagai ibu kota semakin berat. Studi literatur menunjukkan bahwa pemindahan ini bertujuan mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan efisiensi pemerintahan.

1. Pendahuluan

Kalimat Ibu kota atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai capital city berasal dari bahasa latin yakni caput yang berarti kepala (head). Dalam Black's Law Dictionary, kata capital mempunyai banyak makna tergantung dalam konteks yang dipergunakan. Sementara itu ibu kota, di dalam Black's Law Dictionary mengartikan Capital sebagai place where legislative department holds its sessions and where chief offices of the executive are located; political and governmental metropolis. Capital juga dapat diartikan sebagai seat of government (Henry Black Campbell, 1968). (Firmanda, Afia, et al., 2022)

Ibu kota memiliki peran penting dalam menunjukkan karakter sebuah negara, baik sebagai pusat kota maupun sebagai dasar kebutuhan sebuah kota. Ibu kota sebagai pusat kota diartikan sebagai tempat pusat pemerintahan yang mempresentasikan kekuatan politik. Ibu kota juga diartikan sebagai simbol kota yang mampu membedakan fungsi politik, ekonomi, dan budaya. Melalui peran tersebut, maka kota akan melakukan proses pembentukan struktur fisik kota. Saat kota mencapai pertumbuhan yang optimal, maka pertumbuhan ekonomi, kehidupan masyarakat, dan lainnya akan membaik. Jika pertumbuhan kota melewati batas optimal, akan menimbulkan berbagai masalah di perkotaan. (Nurhermaya & Sugangga, 2021)

Pada bulan Juli 2024, Ibu Kota Negara (IKN) direncanakan akan pindah ke Kalimantan Timur. Kebijakan untuk memindahkan IKN telah lama digagas, bahkan sejak pemerintah Hindia Belanda. Namun, secara serius wacana itu baru disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019. (Firmanda, Afia, et al., 2022) Bahwa pemerintahan kementerian dan lembaga yang mendukung kerja serta tugas presiden dan wakil presiden akan menjadi klaster pertama yang dipindahkan di ibu kota baru. Setelah klaster pertama tersebut pindah baru lah terjadi pemindahan kementerian serta lembaga-lembaga yang memiliki tugas terkait dengan proses pembangunan. Berdasarkan rencana tersebut, hal ini berdampak akan banyak gedung kementerian serta lembaga akan ditinggalkan di Jakarta sebagai ibu kota yang lama. DPR telah menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara, sementara itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan agenda meletakan batu pertama atau ground breaking di Sepaku, Kalimantan Timur pada bulan Agustus 2022. fenomena rencana pindahnya Ibu Kota Negara Indonesia tersebut menarik banyak perhatian publik seperti media massa di Indonesia. CNBC Indonesia.com dan juga CNBC Indonesia.com. (Insani Fairuz & Zamzamy, 2023) Sejumlah permasalahan menjadi dasar mengapa pemindahan ibu kota harus disegerakan. Pertama, yaitu kepadatan penduduk terutama di wilayah Jakarta dan pulau Jawa. Kedua, Kesenjangan pembangunan antar wilayah yang juga menjadi alasan kuat pemindahan Ibu Kota Negara. (Shalih et al., 2018).

Dari perspektif kebencanaan, Pulau Jawa rawan bencana gempa bumi dan Banjir, terlebih Jakarta yang berada dalam ring of fire. Selain itu, Lalu lintas dan permukiman di Jakarta macet, penuh sesak dan kumuh. Kondisi di atas tentu sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar 56 triliun per tahun. Masalah

berikutnya yakni kualitas dan ketersediaan air bersih yang merupakan sarana vital bagi warga ibu kota. (Saputra et al., 2021) Lapangan pekerjaan dan kesenjangan sosial serta masalah lainnya juga sudah sangat mendesak. Jakarta dianggap terlalu padat sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi (Balitbang Pontianak, 2018).

Salah satu topik yang trending di Twitter adalah terkait isu pemindahan ibu kota Indonesia. Wacana tentang pemindahan ibu kota senantiasa muncul disetiap era presiden, namun wacana tersebut kembali trending setelah pemerintahan Presiden Jokowi membahas hal tersebut kembali (Septiana, 2018). Wacana pemindahan merupakan bagian dari kepentingan bangsa dan sebagai upaya menyongsong persaingan global (Toun, 2018). Namun dibalik hal tersebut terdapat kontroversi dari pihak yang merasa pro dan kontra, masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda. Hal ini menyebabkan munculnya fenomena perdebatan khususnya di Twitter yang sebenarnya menunjukkan perhatian kolektif mengenai wacana publik tersebut (Andriani, 2018). Kecenderungan pengguna Twitter dalam memposting konten dapat diketahui dengan cara analisis sentimen (Pratama, Andrean dan Nugroho, 2019). Dengan cara memisahkan opini berdasarkan kelas yakni positif dan negatif. Selain itu dilakukan teknik pengambilan kesimpulan terkait faktor apa yang sering dibahas dalam opini tersebut (Novantirani, Sabariah dan Effendy, 2015). (Arsi & Waluyo, 2021)

Salah satu penelitian yang pro terhadap pemindahan ibu kota, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara, diketahui bahwa persepsi masyarakat mengenai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur secara umum positif. Tingkat Pengetahuan: Sebanyak 67,31% masyarakat mengetahui tentang rencana pemindahan ibu kota negara. Tingkat pengetahuan terkait alasan pemindahan mencapai 51,92%, dan pengetahuan tentang dampak pemindahan adalah 42,31%. Sebanyak 57,69% masyarakat menyatakan setuju atau menerima pemindahan ibu kota. Tingginya tingkat pengetahuan masyarakat disebabkan oleh aktifnya sosialisasi kebijakan melalui berbagai media massa. Sosialisasi ini dianggap penting untuk menciptakan kesamaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah mengenai urgensi pemindahan ibu kota. Kemudian secara umum, masyarakat di Penajam Paser Utara menunjukkan persetujuan atas kebijakan pemindahan ibu kota dan menerima dampak serta alasan pemindahan yang telah diketahui melalui berbagai sumber informasi. (Hidayat, n.d.)

Kontra terhadap pemindahan ibu kota adalah dampak negatif proyek IKN terhadap masyarakat adat ditemukan dalam dokumen Kajian Awal Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur yang ditebitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pada suatu kesempatan wawancara yang dilakukan bersama peneliti, Dr. Vivi Yulaswati menjelaskan bahwa tantangan kemasyarakatan secara umum yang telah dimitigasi terkait proyek IKN adalah masalah kepemilikan lahan, kekhawatiran kesempatan kerja, dan pengakuan identitas budaya. (Hidayat, n.d.) Opini publik tentang pemindahan ibu kota terpecah antara yang pro dan kontra. Masyarakat Penajam Paser Utara secara umum mendukung rencana tersebut karena pengetahuan yang memadai dan sosialisasi yang efektif. Namun, masyarakat adat menunjukkan kekhawatiran yang signifikan terkait kepemilikan lahan, kesempatan kerja, dan identitas budaya mereka. Fenomena ini mencerminkan adanya perhatian kolektif dan

perdebatan yang cukup intens di kalangan masyarakat, terutama di media sosial seperti Twitter, di mana analisis sentimen menunjukkan adanya perbedaan opini yang jelas antara yang mendukung dan yang menentang rencana pemindahan ibu kota.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. (Anggito & Setiawan, 2018) Data dan sumber data yang digunakan melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui tinjauan pustaka. Taylor dan Procter mendefinisikan tinjauan pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang kita teliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Hutasoit, (2019) Menjelaskan di antara argumen pro pemindahan ibu kota negara adalah upaya untuk meringankan beban Jakarta sebagai ibu kota yang penuh dengan masalah perkotaan, seperti kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk, dan polusi. Jakarta menjadi salah satu kota terpadat di dunia, dengan populasi yang terus bertambah setiap tahun. Pemindahan ibu kota diharapkan dapat mengurangi tekanan pada infrastruktur dan lingkungan di Jakarta, sehingga memungkinkan pengembangan kota tersebut secara lebih berkelanjutan. Selain itu, pemindahan ibu kota juga dianggap sebagai langkah untuk memajukan pembangunan di wilayah lain di Indonesia. Sebagian besar pembangunan dan investasi di Indonesia terpusat di pulau Jawa, khususnya di sekitar Jakarta.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur diharapkan dapat meratakan pembangunan di seluruh negara dan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antarwilayah. Aspek keamanan juga menjadi pertimbangan penting dalam pemindahan ibu kota. Jakarta terletak di pantai yang rentan terhadap ancaman bencana alam, seperti banjir dan gempa bumi. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur yang terletak lebih jauh dari garis pantai, diharapkan keamanan nasional dapat ditingkatkan dan ancaman dari luar negeri dapat diminimalisir. Namun, di sisi lain, ada juga berbagai argumen kontra terkait pemindahan ibu kota negara. Salah satunya adalah masalah biaya dan anggaran. Proyek sebesar ini membutuhkan investasi yang sangat besar, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Beberapa pihak skeptis terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran yang diperlukan untuk proyek ini tanpa mengabaikan sektor-sektor lain yang juga

membutuhkan perhatian, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (Petriella, t.t.). Dampak lingkungan juga menjadi perhatian utama dalam pemindahan ibu kota negara. Kalimantan Timur merupakan wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki ekosistem hutan hujan tropis yang penting. Pembangunan infrastruktur dan penyesuaian lahan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya habitat, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan dan upaya keberlanjutan menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam setiap tahap proyek. Selain itu, pemindahan ibu kota juga akan berdampak pada masyarakat lokal yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut. Proses relokasi dapat menimbulkan ketidaknyamanan, perubahan sosial, dan konflik. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan, kompensasi yang layak, serta dukungan untuk adaptasi dan perubahan yang diperlukan. (Alfiansyah, 2023)

Lazimnya, pemindahan ibu kota pada beberapa negara disebabkan oleh beberapa faktor seperti dasar efisiensi, bencana, politik dan sebagainya⁶. Adapun wacana pemindahan di ibu kota di Indonesia dapat diidentifikasi pada sejumlah faktor:

1. Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi, yang mana Jakarta dinilai tidak efektif dan efisien sebagai ibu kota, dikarenakan kemacetan kronis di Jakarta, baik di lalu lintas darat, udara (bandara) ataupun laut (pelabuhan)⁷. Oleh sebab itu, atas dasar efektivitas dan efisiensi, Presiden RI menetapkan pemindahan ibu kota yang sedianya akan dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2024. (penetapan tersebut dilaksanakan sebelum Pandemi COVID-19 di Indonesia, dan belum ada keputusan lebih lanjut mengenai batal atau tidaknya pemindahan ibu kota).
2. Berkaitan dengan pemerataan ekonomi. Pembangunan di Indonesia sejak kemerdekaan 1945 cenderung bersifat tersentralistik di Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa jauh lebih maju dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Berbagai pusat-pusat institusi berada di Pulau Jawa. 54 persen dari total penduduk Indonesia (150 juta penduduk) dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Diharapkan dengan pindahnya ibu kota, maka perputaran roda perekonomian tidak lagi terkonsentrasi di Pulau Jawa. Bila dikaitkan dengan konsep di ilmu Ekonomi, hal ini sejalan dengan teori lokasi yang mana terkait dengan keputusan lokasi, yakni keputusan tentang bagaimana perusahaan-perusahaan memutuskan di mana lokasi pabriknya atau fasilitas-fasilitas produksinya secara optimal. Berpindahnya pusat pemerintahan tentu akan diikuti oleh sejumlah perusahaan, atau setidaknya BUMN di Indonesia akan banyak berpindah ke Kalimantan. Karena lokasi produksi khususnya BUMN seyogyanya dekat dengan pusat pemerintahan. (Wati SSosI & Yuningsih SIkom, 2021)

Pemindahan ibu kota mendapatkan pro dan kontra sebagai berikut:

Kabupaten Penajam Paser Utara:	Proyek IKN terhadap masyarakat adat
Tingkat Pengetahuan Sebanyak 67,31% masyarakat mengetahui tentang rencana pemindahan ibu kota negara. Tingkat pengetahuan terkait alasan pemindahan mencapai 51,92%, dan pengetahuan tentang dampak pemindahan adalah 42,31%. Sebanyak 57,69% masyarakat menyatakan setuju atau menerima pemindahan ibu kota.	Dalam dokumen Kajian Awal Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pada suatu kesempatan wawancara yang dilakukan bersama peneliti, Dr. Vivi Yulaswati menjelaskan bahwa tantangan kemasyarakatan secara umum yang telah dimitigasi terkait proyek IKN adalah masalah kepemilikan lahan, kekhawatiran kesempatan kerja, dan pengakuan identitas budaya.

Berdasarkan data di atas pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur memunculkan berbagai pandangan di masyarakat, terutama di Kabupaten Penajam Paser Utara dan di kalangan masyarakat adat setempat. 1. Tingkat Pengetahuan dan Persetujuan di Kabupaten Penajam Paser Utara: - Sebanyak 67,31% masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara mengetahui tentang rencana pemindahan ibu kota negara. - Pengetahuan masyarakat terkait alasan pemindahan mencapai 51,92%, dan pengetahuan tentang dampak pemindahan adalah 42,31%. - Sebanyak 57,69% masyarakat menyatakan setuju atau menerima pemindahan ibu kota. - Tingkat pengetahuan yang tinggi ini menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan pemindahan ibu kota telah dilakukan dengan efektif, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai rencana dan alasan di balik pemindahan tersebut.

Dampak Proyek IKN terhadap Masyarakat Adat Dalam dokumen Kajian Awal Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, terdapat beberapa tantangan kemasyarakatan yang telah diidentifikasi. Tantangan utama yang telah dimitigasi meliputi masalah kepemilikan lahan, kekhawatiran tentang kesempatan kerja, dan pengakuan identitas budaya. Dalam wawancara dengan Dr. Vivi Yulaswati, dijelaskan bahwa kekhawatiran utama masyarakat adat adalah terkait potensi kehilangan tanah dan identitas budaya mereka. Masyarakat adat khawatir bahwa pembangunan ibu kota baru akan mengganggu kehidupan mereka dan menyebabkan marginalisasi.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat dukungan yang cukup signifikan dari masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara, kekhawatiran dari masyarakat adat terkait dampak sosial dan budaya dari pemindahan ibu kota tetap menjadi isu yang penting untuk diperhatikan dan ditangani oleh pemerintah.

Contoh kasus pemindahan ibu kota:

Pada kasus di berbagai negara pemindahan ibu kota banyak dilakukan oleh banyak negara, dengan alasan yang berbeda-beda. Contoh berikut memberikan gambaran bahwa pemindahan ibu kota negara itu tidak tabu dan dilakukan dengan tujuan memecahkan permasalahan untuk menuju ke perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara. 1) Brasilia ibu kotanya terletak di pedalaman, karena ibu kota lama Rio Jenairo sudah terlalu padat 2) Pemerintah Korea Selatan da;lam tahun 2004 ibu kotanya pindah dari Seoul ke Sejong, meskipun Seoul itu berarti ibu kota dalam bahasa Korea. 3) Ibu kota tradisional secara ekonomi memudar oleh kota pesaingnya, seperti Nanjing oleh Shanghai. 4) Menurunnya suatu dinasti atau budaya dapat juga ibu kota yang telah ada mati/pudar/kalah pamor seperti di Babilon dan Cahokia. Selain ibu kota negara dipindahkan terdapat juga pemindahan sebagian dari kekuasaan pemerintah, contoh berikut dapat dijadikan salah satu alternatif untuk pemecahan masalah yang terkait dengan ibu kota negara. (Wati SSosl & Yuningsih SIKom, 2021)

Aspek-Aspek Yang Harus Diperhatikan dalam Pemindahan IKN

1. Aspek Sosiologis Rencana pemindahan IKN otomatis akan diikuti dengan adanya pemindahan manusia.
2. Aspek Geografis Presiden Joko Widodo menyebutkan lima alasan utama dipilihnya Kalimantan sebagai IKN, yaitu: 1. Risiko bencana alam yang minimal, baik banjir, tsunami, kebakaran hutan, gunung merapi maupun tanah longsor. 2. Lokasi yang strategis dan ada di tengah-tengah Indonesia. 3. Lokasi yang berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda. 4. Infrastruktur relatif lengkap. 5. Tersedia lahan yang dikuasai pemerintah 180 ribu hektar.(Ernawati et al., 2022)

Adapun peraturan turunan dalam UU IKN adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Pemerintah terkait kewenangan khusus Badan otorita (pasal 12) , pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (pasal 24) , penyusunan rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara (pasal 25), tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Ibu Kota Nusantara (pasal 26) , pengelolaan Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan pemindahan IKN (pasal 35), persiapan dan/atau pembangunan IKN oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (pasal 36) , susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pembentukan peraturan IKN selain mengenai pajak dan pungutan lain, serta pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN oleh Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden (pasal 5)

2. Rperpres terkait perincian dan perubahan rencana induk ibu kota nusantara (pasal 7) , struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (pasal 11), pembagian wilayah Ibu Kota Nusantara (pasal 14), Rencana Tata Ruang Kawasan. Strategis Nasional IKN (pasal 15), mengenai pemindahan Lembaga Negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional (pasal 22)
3. Keppres terkait penetapan pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran IKN dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (pasal 4), penetapan pemindahan IKN dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (pasal 39)(Saraswati et al., 2022)

4. Kesimpulan

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur memiliki berbagai dampak dan pandangan dari masyarakat. IKN direncanakan akan pindah pada Juli 2024, sesuai dengan mandat Presiden Joko Widodo, untuk mengatasi beberapa masalah mendesak seperti kepadatan penduduk di Jakarta, ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan risiko bencana alam di Pulau Jawa. Pemindahan ini juga diharapkan dapat memperbaiki kondisi lalu lintas, permukiman, ketersediaan air bersih, lapangan pekerjaan, dan mengurangi kerugian ekonomi yang signifikan di Jakarta.

Dukungan dan Pengetahuan Masyarakat:- Di Kabupaten Penajam Paser Utara, sebanyak 67,31% masyarakat mengetahui tentang rencana pemindahan ibu kota, dengan 57,69% masyarakat menyatakan setuju atau menerima pemindahan tersebut. - Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai alasan pemindahan mencapai 51,92%, sementara pengetahuan tentang dampak pemindahan adalah 42,31%. - Tingginya tingkat pengetahuan ini menunjukkan efektivitas sosialisasi kebijakan pemindahan ibu kota melalui berbagai media massa.

Dampak Sosial dan Kekhawatiran Masyarakat Adat:- Meskipun ada dukungan yang signifikan, masyarakat adat di Kalimantan Timur mengkhawatirkan dampak negatif proyek IKN terhadap kepemilikan lahan, kesempatan kerja, dan identitas budaya mereka. - Tantangan kemasyarakatan yang diidentifikasi oleh Kementerian PPN/Bappenas meliputi masalah kepemilikan lahan, kekhawatiran tentang kesempatan kerja, dan pengakuan identitas budaya. - Kekhawatiran utama masyarakat adat adalah potensi kehilangan tanah dan identitas budaya mereka, serta risiko marginalisasi akibat pembangunan ibu kota baru.

Perdebatan dan Analisis Sentimen:- Opini publik tentang pemindahan ibu kota terpecah antara yang pro dan kontra, dengan perhatian kolektif dan perdebatan intens di media sosial seperti Twitter. - Analisis sentimen menunjukkan adanya perbedaan opini yang jelas antara yang mendukung dan yang menentang rencana pemindahan ibu kota. Secara keseluruhan, meskipun terdapat dukungan yang signifikan dari masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara, kekhawatiran dari masyarakat adat terkait dampak sosial dan budaya dari pemindahan ibu kota tetap menjadi isu penting yang perlu diperhatikan dan ditangani oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- Mahanum. (2021). ALACRITY: Journal Of Education. *Journal Of Education*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Alfiansyah. (2023). Ibu Kota Negara Baru dalam Pandangan Hukum Lingkungan. *Journal of Legal Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.61397/ays.v1i1.4>
- Arsi, P., & Waluyo, R. (2021). Analisis Sentimen Wacana Pemindahan Ibu Kota Indonesia Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (SVM). *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 8(1), 147–156. <https://doi.org/10.25126/jtiik.202183944>
- Ernawati, A., Wahyudi, J., Astuti, A. D., & Aini, S. Q. (2022). Analisis Kelayakan Pendirian Usaha Pengolahan Limbah Medis untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(1), 57–70. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2155>
- Hidayat, R. (n.d.). *Persepsi Publik Terhadap Rencana Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia*.
- Nurhermaya, A., & Sugangga, M. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapat Pemindahan Ibu Kota Jawa Barat. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 10(3). <https://doi.org/10.32315/jlbi.v10i3.51>
- Febriansyah, yogi. (2015). *Kajian Visual Poster Film Drama Pendidikan Sutradara Riri Riza Produksi Miles*. http://repository.upi.edu/21016/6/S_PSR_1103098_Chapter3.pdf
- Insani Fairuz, D., & Zamzamy, A. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Media Online CNBC Indonesia.com dan Kompas.com Mengenai Dampak Lingkungan Pemindahan Ibu Kota Negara. *Journal Of Social Science Research*, 3(4), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3806>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. www.Jejakpublisher.com
- Firmanda, H., Afia, N., & Rahmadani, S. (2022). Kajian Postmoderenisme Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. *Program Studi Ilmu Hukum*, 4(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9919>
- Rukmana, D. (n.d.). *Pemindahan Ibukota Negara*.

- Saputra, S. D., Gabriel J, T., & Halkis, M. (2021). Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara). *Jurnal Ekonomi Pertahanan* , 7(2), 1–29. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/881>
- Saraswati, M. K., Ariananto, E., Adi, W., Perhubungan, K. S., Sekretariat, U., Ri, K., Hukum, A., Subbidang, S., Iklim, P., Lingkungan, P., & Sekretariat, H. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis Swot. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(2), 2598–9944. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.3086/http>
- Wati SSosl, L., & Yuningsih SIlkom, S. (2021). *Analisis Framing Rencana Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dalam Video “Dilema Ibu Kota Baru: Selamatkan Jakarta, Korbankan Kalimantan?” Pada Channel Youtube Bbc News Indonesia Article Information* (Vol. 1, Issue 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/interaksi.v1i2.21322>